



Judul : Badan anggaran marah bila diawasi BAKN
Tanggal : Selasa, 07 Mei 2013
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Badan Anggaran Marah bila Diawasi BAKN

BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengawasi proses pembahasan APBN di DPR. Lembaga itu hanya bisa menelaah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa bisa mengawasi proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“BAKN tugasnya menelaah hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan ke DPR. Geleng-geleng kepala semua orang, waktu BAKN merekomendasikan, pimpinan Banggar malah balik marah sama kita. Sesama DPR kok mengkritik,” ungkap Ketua BAKN Sumarjati Arjoso di Jakarta, kemarin.

Sumarjati menerangkan lembaga yang dipimpinnya sebenarnya berkeinginan untuk menelisik dan mengawasi dugaan kecurangan anggaran dan keuangan negara. Namun, langkah terse-

but ternyata tidak disetujui DPR sendiri.

“Kami sebenarnya ingin awasi, tapi justru dikritik dibilang BAKN berlebihan. Kami ingin bergigi, tapi nyatanya tidak diberi gigi,” imbuhnya.

Lebih jauh Sumarjati menyatakan pihaknya berkeinginan agar kewenangan BAKN diperluas dan ditambah. Ia pun berniat mengajukan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) agar BAKN lebih bergigi.

“Kami akan revisi UU MD3, tapi itu saja banyak yang tidak setuju. Kewenangan kami sangat terbatas,” keluhnya.

Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan APBN merupakan sasaran paling empuk bagi permainan uang.

Melalui prosedur birokrasi yang panjang, pembahasan APBN sering menjadi incaran para koruptor. “Ya, karena pembahasannya cepat hingga publik juga tidak memantau. Malah sering kali muncul program-program yang tidak dibutuhkan masyarakat dengan dalih butuh anggaran cepat untuk program itu. Apalagi sekarang akan membahas APBN-P,” ujar Uchok.

Lebih lanjut, kata dia, beberapa proyek rekaan pun muncul seperti penelitian flu burung dan pengadaan alutsista. Permainan uang, imbuhnya, bukan lagi tumbuh subur, melainkan sudah membudaya.

“Jadi kita tak lagi bisa memisahkan, apakah dia dari legislatif, apa dari kementerian, apa dia memang mafia anggaran. Sudah jadi budaya. Bahkan, bisa dikatakan suatu proses yang tidak gratis,” tukasnya. (Fid/AN/P-3)